



## ANALISIS BIBLIOMETRIK ATAS FENOMENA DISENFRANCHISEMENT DALAM PEMILIHAN UMUM

Zakly Hanafi Ahmad<sup>1\*</sup>, Arissy Jorgi Sutan<sup>2</sup>, Azira Novia Rizal<sup>3</sup>, Syurpana Nofanda<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Email penulis korespondensi: [zaklyhanafi@unja.ac.id](mailto:zaklyhanafi@unja.ac.id)

### Abstract

*This study aims to explore the global development of research on the theme of disenfranchisement in elections, focusing on the Scopus database from 2020 to 2025. Disenfranchisement, defined as the loss or limitation of voting rights, is a critical issue in democratic studies, affecting the legitimacy and inclusivity of electoral systems. The research employs a scoping review methodology combined with bibliometric analysis using R and Biblioshiny, guided by PRISMA protocols. A total of 60 articles were selected based on specific inclusion criteria, including publication year, subject area, language, and document type. The bibliometric analysis is structured into three main components: author analysis, document analysis, and conceptual structure mapping. Results show that the United States dominates scientific production on this topic, while countries from the Global South, such as Nigeria, are emerging contributors. Key findings include the identification of influential authors, thematic trends over time, and keyword co-occurrence networks. The study reveals a multidimensional research landscape, where disenfranchisement is examined not only through political lenses but also legal, sociological, and behavioral perspectives. The novelty of this research lies in its comprehensive bibliometric mapping of disenfranchisement studies at a global scale, which has been underexplored in previous literature. The implications are significant for future research and policy development, as the findings highlight gaps in representation and collaboration across regions. This study contributes to the advancement of social science by offering strategic insights into the dynamics of electoral exclusion and promoting inclusive democratic practices through evidence-based scholarship.*

*Keywords:* Bibliometric analysis, Disenfranchisement, Election

### PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada mengkaji terkait perkembangan tema tema penelitian terkait dengan perkembangan fenomena *Disenfranchisement* dalam lingkup spektrum literature dengan berfokus pada Scopus database. Hak pilih adalah hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara dan menjadi salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Hak ini bukan hanya sekadar instrumen politik, tetapi penentu kualitas dan legitimasi demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa sering pemilu diselenggarakan, tetapi sejauh mana hak pilih setiap warga negara benar-benar terlindungi. Namun dalam praktiknya, hak pilih kerap terancam oleh berbagai hambatan administratif dan kesalahan prosedural yang berujung pada hilangnya hak suara sebagian warga negara dan menciptakan fenomena *disenfranchisement* yang menggerus kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Penelitian terdahulu mengenai penerapan political *disenfranchisement* sebagai salah satu instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia menemukan bahwa penerapan *disenfranchisement* yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan menjaga integritas demokrasi dan hak pilih individu (Ferrer et al., 2024; Jumaeli, 2021; Rumbia et al., 2024).

*Disenfranchisement* dalam pemilu merupakan kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat kehilangan hak atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung (Amaker et al., 2022; Herman et al., 2024; Morey et al., 2020; Platon, 2020). Fenomena ini menjadi perhatian serius dalam studi demokrasi karena menyangkut prinsip dasar partisipasi politik yang inklusif dan adil. Secara global, *disenfranchisement* dapat terjadi melalui

berbagai mekanisme, mulai dari kebijakan hukum yang secara eksplisit melarang kelompok tertentu untuk memilih, seperti mantan narapidana, warga negara asing, atau individu dengan gangguan mental, hingga hambatan administratif yang secara sistemik menghalangi akses terhadap proses pemilu. Misalnya, di Amerika Serikat, beberapa negara bagian menerapkan kebijakan *disenfranchisement* yang melarang mantan narapidana untuk memberikan suara, meskipun mereka telah menyelesaikan masa hukuman. Di negara lain seperti Australia dan Denmark, warga negara yang tinggal di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dapat kehilangan hak pilih karena tidak memenuhi persyaratan administratif tertentu. Selain itu, intimidasi politik, penyebaran informasi palsu, dan kurangnya akses terhadap informasi pemilu juga menjadi faktor yang memperburuk *disenfranchisement*, terutama di negara-negara dengan tingkat literasi politik yang rendah atau sistem pemilu yang kompleks. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa *disenfranchisement* tidak selalu bersifat eksplisit, melainkan bisa terjadi secara tersembunyi dan sistemik, sehingga sulit dikenali namun berdampak besar terhadap kualitas demokrasi dan representasi politik (Baker, 2021; Fatai, 2020; Park et al., 2021).

Di Indonesia, *disenfranchisement* dalam pemilu sering kali dialami oleh kelompok-kelompok rentan yang secara struktural dan sosial berada di posisi yang kurang diuntungkan. Kelompok seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, pekerja migran, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam menggunakan hak pilih mereka. Meskipun secara hukum mereka memiliki hak suara yang sama dengan warga negara lainnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap tempat pemungutan suara (TPS), informasi pemilu, dan fasilitas pendukung masih sangat terbatas (Agus Sutisna & Ita Nurhayati, 2021; Jumaeli, 2021; Zarkasi et al., 2025). Misalnya, TPS yang berlokasi jauh dari pemukiman masyarakat adat atau daerah terpencil membuat partisipasi mereka dalam pemilu menjadi tidak praktis dan mahal secara waktu dan biaya. Penyandang disabilitas juga sering kali menghadapi TPS yang tidak ramah aksesibilitas, seperti tidak adanya jalur kursi roda atau petugas yang memahami kebutuhan khusus mereka. Selain itu, pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup atau mengalami keterlambatan dalam pengiriman surat suara, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi. Praktik politik uang, manipulasi data pemilih, dan ketidaknetralan aparat pemerintah juga memperburuk kondisi ini, karena menciptakan lingkungan pemilu yang tidak adil dan tidak transparan. *Disenfranchisement* dalam konteks Indonesia bukan hanya soal kehilangan hak suara, tetapi juga soal hilangnya representasi politik yang seharusnya mencerminkan keberagaman dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Ketika kelompok-kelompok ini tidak terwakili dalam proses politik, maka kebijakan yang dihasilkan pun cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan mereka, sehingga memperkuat siklus ketimpangan sosial dan politik. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara pemilu, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil untuk terus mendorong pemilu yang inklusif, adil, dan dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (Esfandiari & Fatih, 2020; Ilma andasari et al., 2022).

*Disenfranchisement* dalam pemilu merupakan isu yang telah lama menjadi perhatian dalam studi demokrasi dan partisipasi politik. Secara konseptual, *disenfranchisement* merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok kehilangan hak atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Fenomena ini dapat muncul karena berbagai faktor, baik yang bersifat struktural, administratif, maupun sosial. Dalam literatur politik, *disenfranchisement* sering dikaitkan dengan kebijakan hukum yang membatasi hak pilih kelompok tertentu, seperti mantan narapidana, warga negara asing, atau individu dengan gangguan mental (Guderjan & Wilding, 2020; Lidauer, 2022). Di beberapa negara, regulasi semacam ini dibuat dengan dalih menjaga integritas pemilu, namun dalam praktiknya justru menciptakan ketimpangan akses terhadap hak politik. Selain itu, hambatan administratif seperti proses pendaftaran pemilih yang rumit, kurangnya informasi, dan lokasi TPS yang sulit dijangkau juga menjadi penyebab utama *disenfranchisement*, terutama di negara-negara berkembang (Dawood, 2022; Dolan, 2023). Faktor sosial seperti kemiskinan, rendahnya literasi politik, dan marginalisasi kelompok tertentu memperbesar risiko *disenfranchisement*, karena kelompok-kelompok ini cenderung tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan fasilitas pemilu. Praktik politik uang, manipulasi data pemilih, dan ketidaknetralan aparat negara juga memperburuk situasi, menciptakan lingkungan pemilu yang tidak adil dan tidak inklusif (Bateman, 2025; Dawood, 2022; Dolan, 2023; Yeargain, 2022).

Untuk mengatasi *disenfranchisement*, literatur akademik menekankan pentingnya pendekatan multidimensi yang melibatkan reformasi hukum, peningkatan kapasitas institusi pemilu, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Revisi terhadap regulasi yang diskriminatif menjadi langkah awal yang krusial, agar semua warga negara memiliki hak pilih yang setara tanpa pengecualian yang tidak berdasar. Penyelenggara pemilu perlu memastikan bahwa sistem pendaftaran dan distribusi logistik pemilu berjalan

secara efisien dan inklusif, termasuk menyediakan TPS yang ramah disabilitas dan menjangkau daerah terpencil (IDEA, 2019). Pendidikan pemilih dan peningkatan literasi politik juga menjadi strategi penting untuk memberdayakan masyarakat agar memahami hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Di sisi lain, pengawasan terhadap praktik politik uang dan netralitas aparat harus diperketat melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Peran organisasi masyarakat sipil dan media dalam mengadvokasi pemilu yang inklusif juga tidak dapat diabaikan, karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan institusi negara. Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan ini, *disenfranchisement* dapat diminimalkan, dan proses demokrasi dapat berjalan lebih representatif, adil, dan berkelanjutan (Abrams et al., 2020; Raines, 2022).

Berdasarkan pada penelitian terdahulu menunjukan bahwa terdapat Gap pada penelitian terdahulu yang masih berfokus pada aspek studi kasus terkait dengan *disenfranchisement*, namun belum berfokus pada lingkup Analisis terkait *disenfranchisement* di lingkup Global. Dalam hal ini masih terdapatnya gap penelitian pada bibliometrik analysis menunjukan adanya kebutuhan untuk memetakan penelitian terdahulu terkait dengan *disenfranchisement* dalam pemilihan politik (pemilu) dalam lingkup global. Sehingga novelty pada penelitian ini ditujukan berfokus pada analisis bibliometrik dengan berfokus pada penelitian terkait dengan *disenfranchisement* dalam pemilihan politik atau pemilu secara global. Pada penelitian ini mencoba menjawab rumusan masalah, yaitu Bagaimana analisis Bibliometrik pada Fenomena *disenfranchisement* dalam Pemilihan Umum serta Dampak yang muncul?

### METODE

Penelitian ini digunakan metodologi Scoping Review dan pendekatan analisis bibliometrik. Di sisi lain, data primer dalam penelitian ini berasal dari basis data Scopus dengan menggunakan aturan PRISMA dan kata kunci "*Disenfranchisement and Election*" dengan menggunakan advanced search dengan Prisma methods sebagai berikut TITLE-ABS-KEY ("*Disenfranchisement*" AND *election*) AND PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2026 AND SUBJAREA (SOCJ). Hasil pencarian menghasilkan 60 dokumen. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis bibliometrik, secara khusus dengan aplikasi R dan Biblioshiny untuk menganalisis data dari basis data Scopus (Imaduddin & Eilks, 2024; Menzemer et al., 2023a, 2023b). Analisis bibliometrik dapat digunakan untuk mengukur dan memvisualisasikan pola produksi penelitian, dinamika kolaborasi, tren penelitian, dan perkembangan tematik dengan menggunakan beberapa indikator seperti frekuensi publikasi, analisis sitasi, struktur kepenulisan bersama (*co-authorship*), dan pemetaan kata kunci, dalam konteks penelitian ini. Pendekatan ini menyoroti baik studi-studi dasar maupun area minat baru, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang menunjukkan peluang menjanjikan untuk penelitian di masa depan. Namun, bidang ini masih menghadapi berbagai hambatan yang berkelanjutan: akses data yang terbatas menghambat kolaborasi lintas disiplin, kurangnya studi jangka panjang membatasi pengembangan wawasan kumulatif, dan penerapan hasil penelitian yang tidak konsisten dalam kebijakan menimbulkan pertanyaan berkelanjutan tentang relevansi praktis. Penelitian ini mencakup tiga tahapan penelitian sebagaimana dijelaskan (Hassan & Duarte, 2024; Kaffash et al., 2021; Lazarides et al., 2023):

#### *Desain Penelitian*

Pada penelitian ini menggunakan metodologi *Scoping Review* dan pendekatan analisis bibliometrik. Di sisi lain, data primer dalam penelitian ini berasal dari basis data Scopus dengan menggunakan aturan PRISMA dan kata kunci "*Disenfranchisement and Election*" dengan menggunakan advanced search dengan Prisma methods sebagai berikut TITLE-ABS-KEY ( "*Disenfranchisement*" AND *election* ) AND PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2026 AND SUBJAREA ( SOCJ ). Hasil pencarian menghasilkan 60 dokumen. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis bibliometrik, secara khusus dengan aplikasi R dan Biblioshiny untuk menganalisis data dari basis data Scopus (Imaduddin & Eilks, 2024; Menzemer et al., 2023a, 2023b). Sehingga data yang digunakan pada Scopus Database spesifik pada tahun 2020 hingga 2025 dengan fokus pada tema "*Disenfranchisement*" dan "*election*".

#### *Target/Subjek Penelitian*

Sasaran dalam penelitian ini berfokus pada literatur terdahulu yang terdapat dalam basis data Scopus, dengan tema utama *Disenfranchisement and Election*. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literatur sistematis, dengan menerapkan aturan PRISMA (*Preferred Reporting Items for*

*Systematic Reviews and Meta-Analyses*) untuk memastikan proses seleksi yang transparan dan terstandarisasi. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian adalah: TITLE-ABS-KEY ("Disenfranchisement" AND election) AND PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2026 AND SUBJAREA (SOCJ). Kriteria inklusi mencakup (1) Tahun publikasi antara 2020 hingga 2025, (2) Subjek dalam bidang Ilmu Sosial, (3) Artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris, (4) Jenis dokumen berupa artikel ilmiah. Hasil pencarian dari Scopus kemudian diekspor dalam format CSV (*Comma Separated Values*) untuk dianalisis lebih lanjut.

### Prosedur Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan perkembangan literatur terkait tema *Disenfranchisement and Election* dalam bidang ilmu sosial. Prosedur penelitian dilakukan melalui tiga tahapan utama sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan penyaringan data: pada tahap ini data dikumpulkan dari basis data Scopus dengan menggunakan aturan PRISMA sebagaimana dijelaskan, dengan kata kunci yang telah ditentukan "Disenfranchisement and Election" TITLE-ABS-KEY ("Disenfranchisement" AND election) AND PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2026 AND SUBJAREA (SOCJ) Hasilnya menunjukkan terdapat 60 dokumen dan diekspor ke dalam file CSV (*comma separated values*)
  - a. Tahun publikasi antara 2020 hingga 2025
  - b. Subjek dalam bidang Ilmu Sosial
  - c. Jenis dokumen berupa artikel ilmiah
  - d. Bahasa publikasi: Bahasa Inggris.
  - e. Hasil pencarian menghasilkan 60 dokumen yang kemudian diekspor dalam format CSV (*Comma Separated Values*) untuk keperluan analisis lebih lanjut.
2. Analisis Data: Tahap kedua adalah analisis data menggunakan pendekatan bibliometrik. Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak R Studio, menggunakan Bibliometrix Packages dan antarmuka visual Biblioshiny. Teknik analisis yang digunakan meliputi:
  - a. Analisis dokumen berdasarkan penulis: untuk mengetahui kontribusi penulis terhadap tema penelitian.
  - b. Analisis sitasi: untuk mengidentifikasi artikel yang paling berpengaruh.
  - c. Analisis keterkaitan kata kunci (*co-occurrence*): untuk memetakan tema dan topik yang sering muncul bersama.
  - d. Analisis kolaborasi penulis (*co-authorship*): untuk melihat jaringan kerja sama antar peneliti.
  - e. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi terhadap studi-studi dasar, tren baru, serta kesenjangan literatur yang dapat menjadi peluang penelitian di masa depan.
3. Penyajian Data: Tahap akhir adalah penyajian hasil analisis dalam bentuk:
  - a. Gambar visualisasi (grafik tren, peta kata kunci, jaringan kolaborasi)
  - b. Tabel statistik
  - c. Penjelasan deskriptif untuk menggambarkan nilai-nilai dan temuan utama dari analisis.



Gambar 1. Langkah penelitian

### Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Scoping Review, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan literatur yang relevan secara sistematis. Basis data Scopus dipilih sebagai sumber utama karena merupakan salah satu indeks literatur ilmiah terbesar dan paling kredibel di dunia, sehingga dapat memberikan jaminan kualitas serta cakupan yang luas terhadap publikasi ilmiah yang dijelaskan.

Proses pengumpulan data dimulai dengan penentuan kata kunci dan kriteria inklusi. Peneliti menetapkan kata kunci utama yaitu "Pencabutan Hak" dan "Pemilu" yang ditelusuri pada bidang judul, abstrak, dan kata kunci (TITLE-ABS-KEY). Pencarian dibatasi dengan sejumlah kriteria, antara lain

tahun publikasi 2020 hingga 2025 (PUBYEAR > 2019 DAN PUBYEAR < 2026), bidang subjek ilmu sosial (SUBJAREA(SOCI)), jenis dokumen artikel ilmiah, serta bahasa publikasi berbahasa Inggris. Batasan ini ditetapkan untuk memastikan hasil pencarian relevan dengan tema penelitian sekaligus terkini dalam rentang lima tahun terakhir.

Tahap berikutnya adalah penerapan metode PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses*) sebagai pedoman seleksi dokumen. Proses ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan akurasi dalam penyaringan data. PRISMA digunakan untuk mengidentifikasi jumlah dokumen awal, menyaring publikasi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, serta menyusun diagram alur seleksi dokumen. Dengan langkah ini, hanya publikasi yang benar-benar memenuhi syarat yang dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.

Setelah proses seleksi selesai, sebanyak 60 dokumen memenuhi kriteria penelitian. Dokumen tersebut diekspor dari Scopus dalam format CSV (*Comma Separated Values*), karena format ini kompatibel dengan perangkat lunak analisis data seperti R Studio dan Biblioshiny. Ekspor data dalam format CSV juga mempermudah pengolahan metadata publikasi.

Tahap terakhir adalah persiapan data untuk analisis. File CSV yang diperoleh berisi metadata publikasi, meliputi judul artikel, nama penulis, tahun terbit, nama jurnal, kata kunci, jumlah sitasi, dan variabel bibliometrik lainnya. Data ini kemudian disusun dan disiapkan untuk analisis bibliometrik, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola publikasi, tren penelitian, serta jaringan kolaborasi ilmiah yang relevan dengan topik pencabutan hak dalam konteks pemilu.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik yang diimplementasikan melalui perangkat lunak R Studio dengan dukungan Bibliometrix Packages dan fitur Biblioshiny. Data yang diperoleh dari basis data Scopus dan diekspor dalam format CSV dianalisis untuk mengidentifikasi pola publikasi, tren penelitian, serta dinamika kolaborasi ilmiah terkait tema *Disenfranchisement and Election*. Analisis dilakukan berdasarkan sejumlah indikator utama, meliputi jumlah publikasi per tahun, tingkat sitasi dokumen, struktur kepenulisan bersama (*co-authorship*), dan keterkaitan kata kunci (*keyword co-occurrence*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memetakan perkembangan tematik, menyingkap kontribusi penulis dan institusi, serta mengidentifikasi kesenjangan literatur yang dapat menjadi peluang riset di masa depan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk visualisasi grafik, tabel, dan uraian deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai lanskap penelitian yang dikaji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

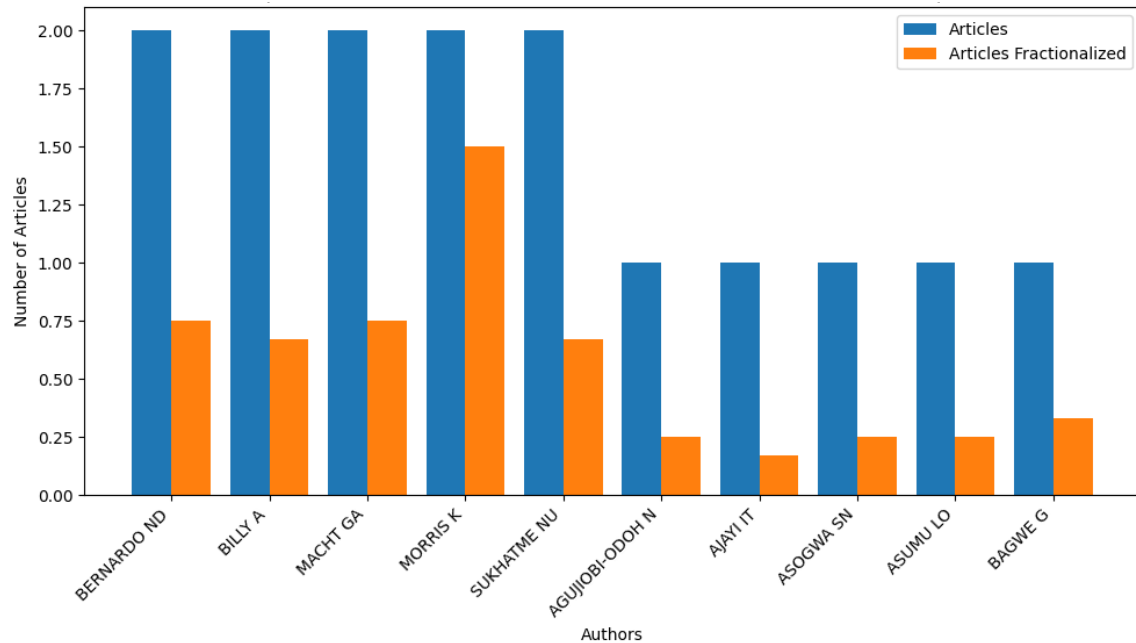
Pada bagian-bagian ini didefinisikan dalam tiga analisis utama adalah: Authors Analysis yang terbagi menjadi tiga sub analisis yaitu: *First*, Most Relevant Authors. *Second*, Author impact. *Third*, Countries Scientific Production. Documents Analysis yang terbagi dalam dua sub analisis yaitu: *First*, Word cloud analysis. *Second*, Word Frequency over time. Conceptual Structure yang terdiri dari satu sub analisis: *First*, the *Co- Occurrence Network and Density Visualization*. Analisis dijelaskan sebagai berikut.

### **1. Authors analysis**

Pada bagian ini berfokus pada menganalisis dokumen dari segi penulis, dengan spesifik pada tiga sub analisis yaitu: *Most Relevant Authors*. *Author local impact*. Serta *Countries Scientific Production*. Pada bagian ini menggunakan analisis pada Biblioshiny pada bagian Authors. Untuk menyampikan hasil analisis menggunakan Deksiropsi dan visual gambar atau tabel. Analisis dijelaskan pada bagian berikut.

#### *a. Analysis Most Relevant Authors case of Disenfranchisement and Election in Scopus Database.*

Pada bagian ini mencoba untuk menganalisis penulis yang paling relevan pada tema penelitian *Disenfranchisement and Election* dalam Indeks Scopus selama tahun 2020 hingga 2025. Analisis menggunakan Biblioshiny pada bagian Most Relevant Authors. Hasil analisis biblioshiny dijelaskan pada Gambar 2 dan Tabel 1 berikut ini:



Gambar 2. Penulis paling relevan kasus pencabutan hak pilih dan pemilihan di database scopus

Tabel 1. Daftar 10 penulis paling relevan tentang *disenfranchisement* dan pemilu di database scopus

Penulis	Jumlah Artikel	Articles Fractionalized
Bernardo Nd	2	0,75
Billy A	2	0,67
Macht Ga	2	0,75
Morris K	2	1,50
Sukhatme Nu	2	0,67
Agujiobi-Odoh N	1	0,25
Ajayi It	1	0,17
Asogwa Sn	1	0,25
Asumu Lo	1	0,25
Bagwe G	1	0,33

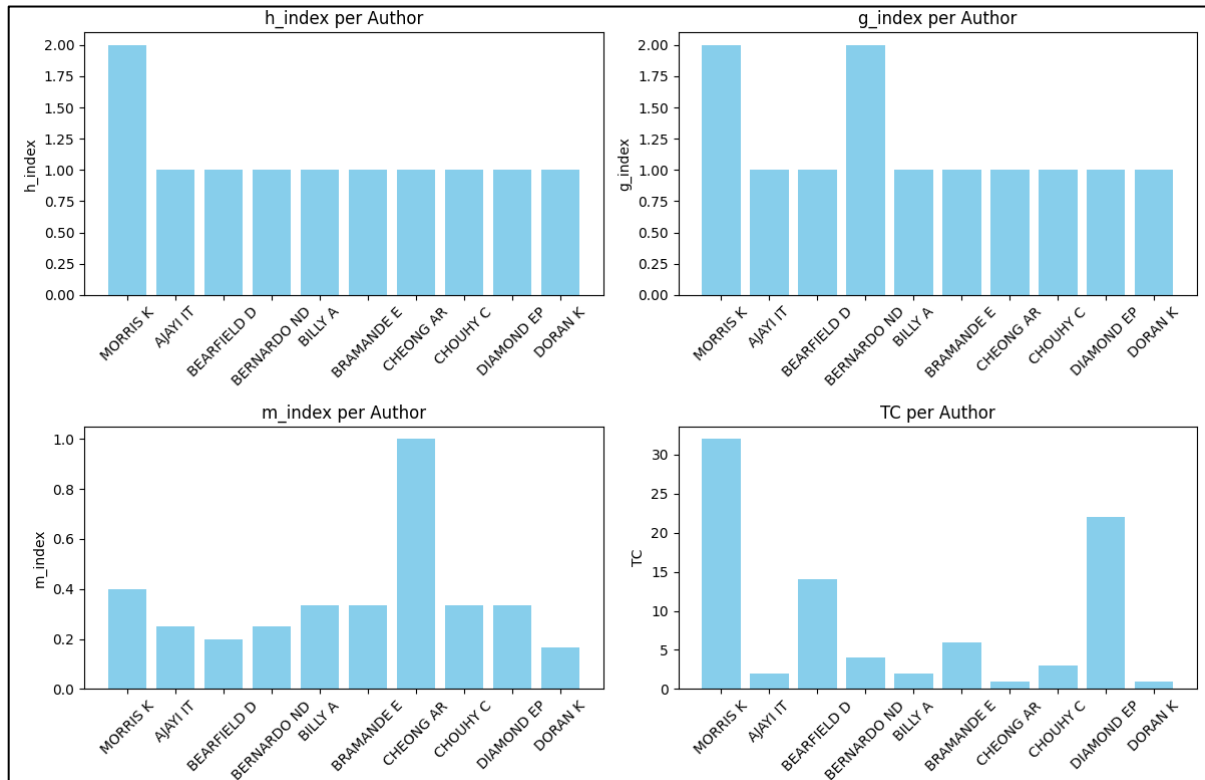
Berdasarkan hasil analisis menggunakan fitur *Most Relevant Authors* dari Biblioshiny, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima penulis yang memiliki kontribusi paling signifikan terhadap tema *Disenfranchisement and Election* dalam indeks Scopus selama periode 2020 hingga 2025. Penulis seperti BERNARDO ND, BILLY A, MACHT GA, MORRIS K, dan SUKHATME NU masing-masing tercatat memiliki dua artikel yang relevan. Di antara mereka, MORRIS K menonjol dengan nilai fractionalized tertinggi sebesar 1,50, yang menunjukkan peran dominan dalam publikasi kolaboratif. Sebaliknya, penulis seperti AJAYI IT, AGUJIJOBI-ODOH N, dan lainnya hanya memiliki satu artikel dengan nilai fractionalized yang lebih rendah, menandakan keterlibatan yang lebih terbatas dalam penelitian kolaboratif.

Visualisasi pada Gambar 2 dan data dalam Tabel 1 memperjelas distribusi kontribusi penulis terhadap tema penelitian. Grafik batang yang ditampilkan menunjukkan perbandingan antara jumlah artikel dan nilai *fractionalized* dari masing-masing penulis, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai siapa saja yang paling aktif dan berpengaruh dalam bidang ini. Analisis ini tidak hanya penting untuk memahami struktur kepenulisan dan potensi kolaborasi antar peneliti, tetapi juga memberikan wawasan strategis dalam mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang dapat menjadi mitra potensial dalam pengembangan penelitian lebih lanjut. Temuan ini membuka peluang untuk membangun jejaring ilmiah yang lebih kuat dan mendukung penguatan literatur dalam isu disenfranchisement dan pemilu secara global.

Pada sub analisis ini menunjukan bahwa 10 penulis tersebut memiliki konstreasi dan dampak yang signifikan dalam perkembangan kajian terkait dengan *Disenfranchisement and Election* dalam skala global. Hal ini menunjukan bahwa adanya pengembangan potensial terkait tema tersebut untuk bisa dikolaborasikan dengan penulis lain secara global kedepannya serta menjadikan penulis tersebut sbagai mitra potensial kedepannya dalam penelitian terkait *Disenfranchisement and Election*. Disisi liannya hal ini juga menunjukan adanya upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung penguatan literature terdahulu pada isu *Disenfranchisement and Election*.

*b. Analysis of Authors Impact on Disenfranchisement and Election Theme Research*

Pada sub analisis ini berfokus pada Penulis yang memiliki impact besar terkait dengan isu penelitian *Disenfranchisement and Election* di Indeks Scopus selama tahun 2020 hingga 2025. Analisis menggunakan Biblio Shiny *Fitur Lokal Penulis*. Hasilnya dijelaskan pada Gambar 3 dan Tabel 2.



Gambar 3. Analisis dampak penulis terhadap *disenfranchisement* dan pemilu dalam database scopus

Table 2. Daftar 10 penulis berdampak tentang *disenfranchisement* dan pemilu di database scopus

Author/ Penulis	h_index	g_index	m_index	TC	NP	PY_start
Morris K	2	2	0,4	32	2	2021
Ajayi It	1	1	0,25	2	1	2022
Bearfield D	1	1	0,2	14	1	2021
Bernardo Nd	1	2	0,25	4	2	2022
Billy A	1	1	0,333	2	2	2023
Bramande E	1	1	0,333	6	1	2023
Cheong Ar	1	1	1	1	1	2025
Chouhy C	1	1	0,333	3	1	2023
Diamond Ep	1	1	0,333	22	1	2023
Doran K	1	1	0,167	1	1	2020

Analisis ini menggunakan fitur *Author Impact* dari Biblioshiny untuk mengukur kontribusi penulis terhadap tema *Disenfranchisement and Election* dalam indeks Scopus selama periode 2020 hingga

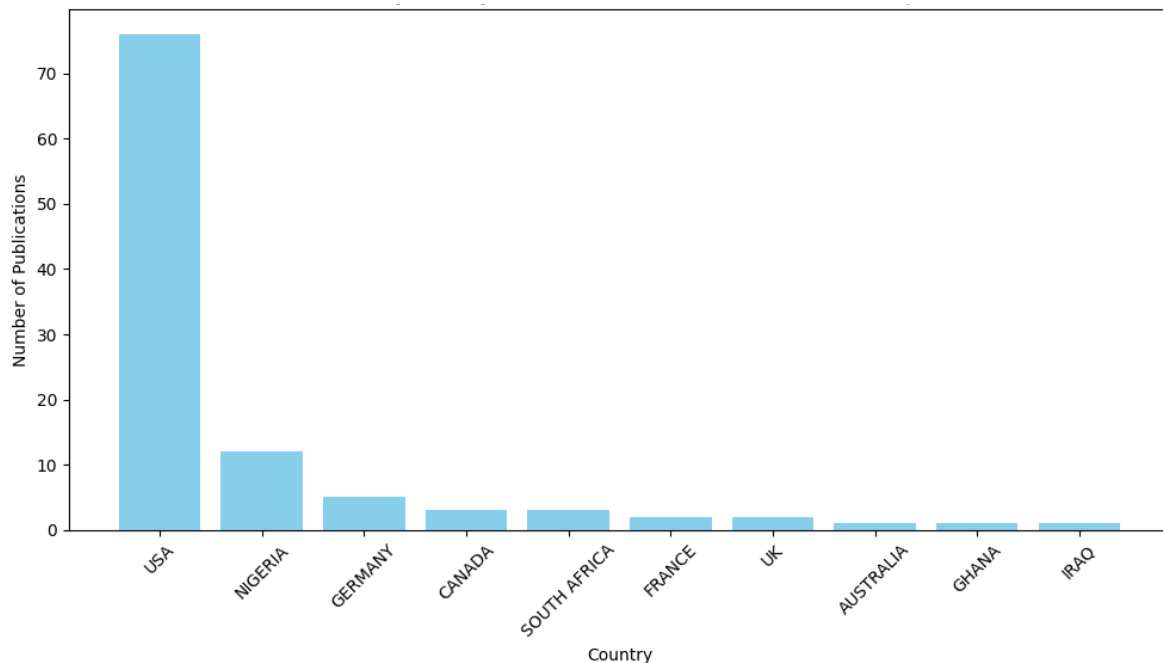
2025. Empat indikator utama digunakan dalam penilaian ini, yaitu h-index, g-index, m-index, dan total citation (TC). Penulis MORRIS K menempati posisi paling berpengaruh dengan skor tertinggi di semua metrik, termasuk total sitasi sebanyak 32, h-index dan g-index masing-masing sebesar 2, serta m-index sebesar 0,4. Hal ini menunjukkan bahwa MORRIS K tidak hanya aktif dalam publikasi, tetapi juga memiliki dampak yang kuat terhadap literatur di bidang ini. Penulis lain seperti DIAMOND EP dan BEARFIELD D juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan total sitasi masing-masing 22 dan 14, meskipun indeks bibliometrik mereka lebih rendah. Sebaliknya, penulis seperti CHEONG AR dan DORAN K memiliki kontribusi yang lebih terbatas, baik dari segi jumlah publikasi maupun pengaruh sitasi.

Visualisasi pada Gambar 3 memperjelas perbedaan tingkat pengaruh antar penulis melalui grafik batang yang membandingkan keempat metrik tersebut. Meskipun beberapa penulis memiliki jumlah publikasi yang sama, tingkat pengaruhnya dapat sangat bervariasi tergantung pada kualitas dan dampak dari karya mereka. Analisis ini memberikan wawasan penting dalam mengidentifikasi penulis yang tidak hanya produktif tetapi juga berpengaruh dalam pengembangan literatur terkait isu *disenfranchisement* dan pemilu. Temuan ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar strategis untuk membangun kolaborasi akademik yang lebih efektif, memperkuat jaringan penelitian, dan mengarahkan fokus kajian ke penulis-penulis yang memiliki potensi besar dalam memperluas pemahaman dan solusi terhadap isu-isu demokrasi dan partisipasi politik.

Temuan ini memperlihatkan bahwa tidak semua penulis yang aktif secara kuantitatif memiliki pengaruh yang sama secara kualitatif. Oleh karena itu, analisis ini memberikan dasar yang kuat untuk mengidentifikasi penulis-penulis kunci yang dapat dijadikan mitra strategis dalam pengembangan penelitian lebih lanjut. Selain itu, pemahaman terhadap indikator-indikator bibliometrik ini penting dalam membangun jaringan kolaborasi akademik yang efektif dan memperkuat literatur ilmiah terkait isu *disenfranchisement* dan pemilu, baik dalam konteks nasional maupun internasional.

*c. Analysis of Countries Scientific Production on Disenfranchisement and Election Theme Research.*

Pada bagian ini mencoba untuk menganalisis negara mana yang paling banyak berkolaborasi untuk menghasilkan artikel berdasarkan penelitian Tema *Disenfranchisement* di Indeks Scopus selama tahun 2020 hingga 2025. Analisis menggunakan Biblioshiny. Hasilnya dijelaskan pada Gambar 4 dan Tabel 3.



Gambar 4. Analisis negara yang memproduksi artikel ilmiah tentang *disenfranchisement* dan pemilu

Table 3. Daftar 10 negara teratas produksi ilmiah di *disenfranchisement* dan pemilu penelitian tema

Negara	Freq
USA	76
NIGERIA	12
GERMANY	5
CANADA	3
SOUTH AFRICA	3
FRANCE	2
UK	2
AUSTRALIA	1
GHANA	1
IRAQ	1

Analisis kontribusi negara terhadap tema *Disenfranchisement and Election* dalam indeks Scopus menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok dalam distribusi geografis publikasi ilmiah. Amerika Serikat (USA) mendominasi secara signifikan dengan total 76 publikasi, menandakan bahwa isu *disenfranchisement* menjadi perhatian utama dalam konteks akademik dan kebijakan di negara tersebut. Posisi kedua ditempati oleh Nigeria dengan 12 publikasi, yang menunjukkan bahwa negara-negara Global South mulai aktif mengangkat isu-isu partisipasi politik dan eksklusivitas dalam sistem pemilu. Negara-negara lain seperti Jerman, Kanada, dan Afrika Selatan memiliki kontribusi yang lebih moderat, sementara Prancis, Inggris, Australia, Ghana, dan Irak menunjukkan keterlibatan yang masih terbatas.

Visualisasi pada Gambar 3 memperjelas ketimpangan kontribusi antar negara, di mana dominasi Amerika Serikat sangat mencolok dibandingkan negara lain. Hal ini memberikan gambaran bahwa literatur ilmiah terkait *disenfranchisement* masih terpusat di negara-negara Barat, khususnya Amerika, sehingga membuka peluang bagi negara-negara lain untuk memperluas partisipasi dalam diskursus akademik global. Temuan ini penting sebagai dasar untuk mendorong kolaborasi internasional yang lebih inklusif dan merata, serta memperkuat representasi isu-isu demokrasi dari berbagai konteks sosial dan politik di dunia. Berdasarkan analisis kontribusi negara terhadap tema *disenfranchisement* dan pemilu dalam indeks Scopus, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan yang cukup besar dalam distribusi geografis publikasi ilmiah. Amerika Serikat mendominasi secara signifikan, menunjukkan bahwa isu ini menjadi fokus utama dalam kajian akademik dan kebijakan di negara tersebut. Sementara itu, negara-negara lain seperti Nigeria, Jerman, dan Kanada mulai menunjukkan keterlibatan, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Temuan ini mengindikasikan perlunya mendorong partisipasi yang lebih luas dari berbagai negara, khususnya dari *Global South*, guna memperkaya perspektif dan memperkuat kolaborasi internasional dalam penelitian isu-isu demokrasi dan partisipasi politik.

## 2. Documents Analysis

Dalam analisis ini, fokus diarahkan pada Narasi dari penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dari dua aspek, yaitu: pertama, analisis *word cloud*; dan kedua, frekuensi kata dari waktu ke waktu dalam penelitian bertema *Disenfranchisement and Election* selama tahun 2020 hingga 2025. Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari sub-analisis dalam bagian ini. Sub-analisis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### a. Wordcloud Analysis on Collaborative Disenfranchisement and Election Theme Research.

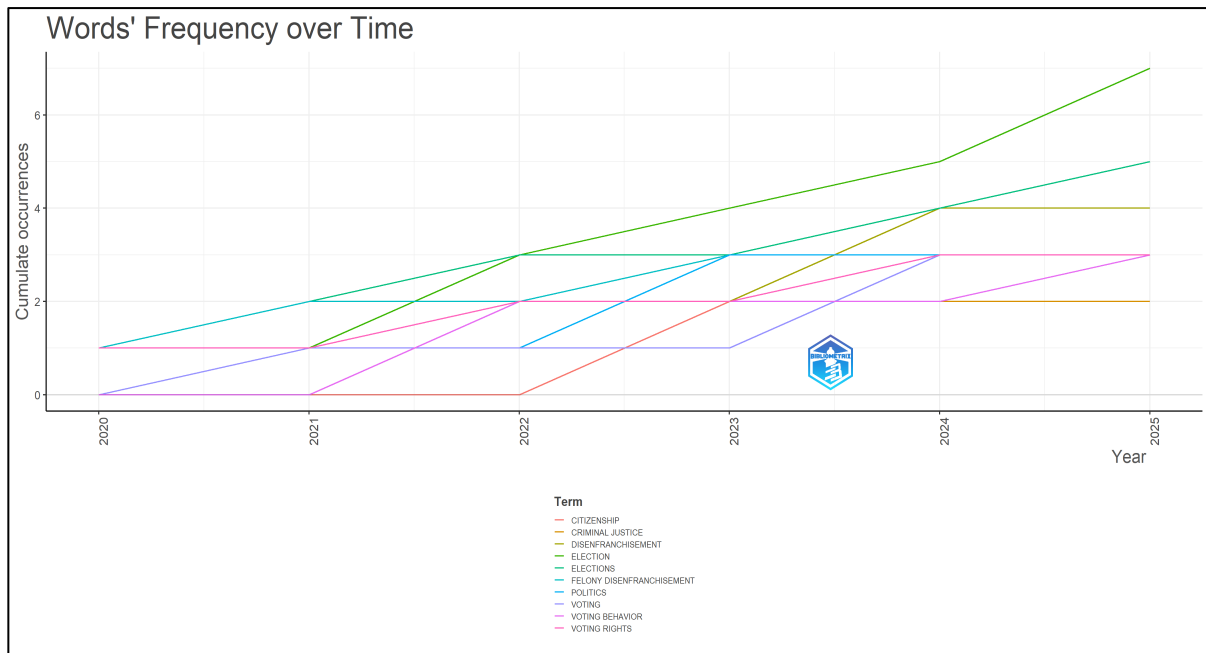
Pada bagian ini, mencoba menganalisis narasi seperti apa yang sedang populer dalam konteks penelitian Tema *Disenfranchisement and Election* dalam Indeks Scopus selama tahun 2020 hingga 2025. Analisis menggunakan Biblioshiny. Hasilnya dijelaskan pada Gambar 5 dan Tabel 4.



pemilu, tetapi juga pada kualitas demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, narasi yang berkembang dalam literatur akademik menunjukkan bahwa pemilu yang inklusif dan adil merupakan fondasi penting bagi sistem politik yang sehat dan berkelanjutan.

*b. Word Frequency overtime Analysis on Disenfranchisement and Election Theme Research.*

Pada bagian ini, mencoba menganalisis tema apa yang populer selama tahun 2020 hingga 2025, yang difokuskan dari tahun ke tahun dalam konteks penelitian Tema Disenfranchisement dan Pemilihan Umum dalam Indeks Scopus selama tahun 2020 hingga 2025. Analisis menggunakan Biblioshiny. Hasilnya dijelaskan pada Gambar 6 dan Tabel 5.



Gambar 6. Analisis frekuensi kata dari waktu ke waktu pada penelitian bertemakan *disenfranchisement* dan pemilu

Tabel 5. Daftar 10 teratas narasi penelitian tema *disenfranchisement* dan pemilu

Year	ELECTION	ELECTIONS	DISENFRANCHISEMENT	FELONY DISENFRANCHISEMENT	POLITICS	VOTING	VOTING BEHAVIOR	VOTING RIGHTS	CITIZENSHIP	CRIMINAL JUSTICE
2020	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
2021	1	2	0	2	1	1	0	1	0	2
2022	3	3	2	2	1	1	2	2	0	2
2023	4	3	2	3	3	1	2	2	2	2
2024	5	4	4	3	3	3	2	3	2	2
2025	7	5	4	3	3	3	3	3	2	2

Berdasarkan analisis *Word Frequency Overtime* terhadap tema *Disenfranchisement and Election* dalam publikasi Scopus tahun 2020–2025, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dalam penggunaan istilah “*election*” dan “*elections*”. Istilah “*election*” yang awalnya tidak muncul pada tahun 2020, meningkat tajam hingga mencapai frekuensi 7 kali pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa isu pemilu semakin menjadi perhatian utama dalam penelitian akademik, seiring dengan meningkatnya

kompleksitas dan tantangan dalam proses demokrasi global. Istilah “*disenfranchisement*” dan “*felony disenfranchisement*” juga menunjukkan pola peningkatan yang signifikan, mencerminkan kekhawatiran yang terus tumbuh terhadap penghilangan hak suara, terutama dalam konteks hukum pidana.

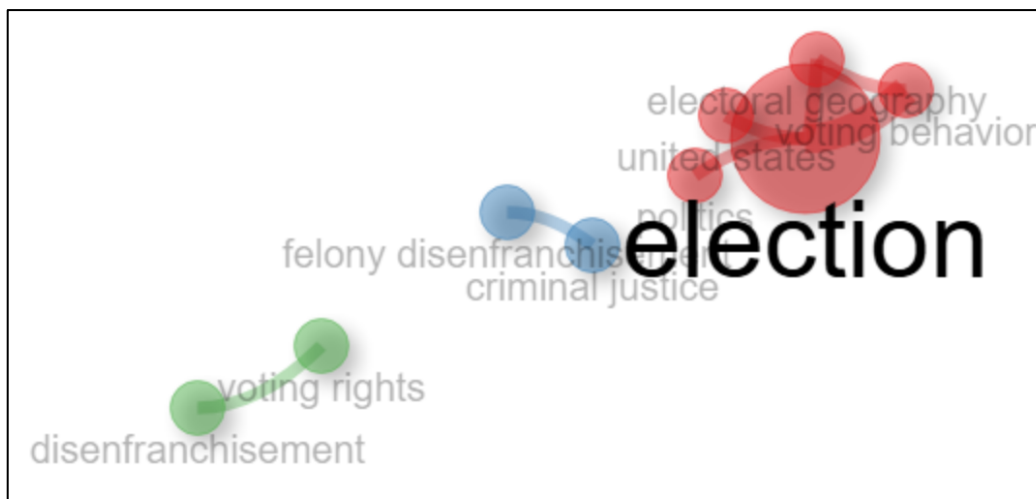
Selain itu, istilah “*voting rights*”, “*voting behavior*”, dan “*criminal justice*” menunjukkan konsistensi dan relevansi yang tinggi sepanjang periode analisis. “*Voting rights*” dan “*criminal justice*” mulai muncul sejak 2020 dan terus meningkat hingga 2025, menandakan bahwa isu hak suara dan sistem hukum menjadi bagian integral dari diskusi akademik mengenai pemilu. Istilah “*citizenship*” mulai muncul pada 2023 dan terus berlanjut, menunjukkan bahwa identitas kewarganegaraan mulai dilihat sebagai elemen penting dalam memahami disenfranchisement. Peneliti tampaknya semakin menyadari bahwa pemilu bukan hanya soal prosedur, tetapi juga menyangkut hak-hak sipil, keadilan sosial, dan inklusi politik. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, penelitian mengenai tema *Disenfranchisement and Election* mengalami perkembangan yang dinamis dan multidimensional. Fokus penelitian bergeser dari sekadar membahas pemilu sebagai proses politik, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana struktur sosial, hukum, dan identitas memengaruhi partisipasi politik. Narasi yang berkembang mencerminkan upaya akademik untuk mengungkap ketimpangan dalam sistem demokrasi dan mencari solusi yang lebih inklusif. Dengan demikian, tren ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga penting secara praktis dalam merancang kebijakan pemilu yang adil dan partisipatif.

### 3. Conceptual Structure analysis

Dalam analisis ini, berfokus pada kecenderungan penulis pada penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan pada aspek, yaitu: *CO-Occurrence Networks and Density Visualization*. Aspek tersebut menjadi sub-analisis dalam bagian ini. Sub-analisis tersebut menjelaskan sebagai berikut:

#### a. Analysis of CO- Occurrence Networks and Density Visualization on Collaborative Governance Theme Research.

Pada bagian analisis ini mecnoaba meilhat terkait aspek *Co-Occurrence Networks and Density* dalam konteks Pencabutan Hak Pilih dan Pemilihan Umum dalam Indeks Scopus selama tahun 2020 hingga 2025. Analisis menggunakan Biblioshiny. Hasilnya dijelaskan pada Gambar 7 dan 8.



Gambar 7. Visualisasi jaringan pada penelitian tema *disenfranchisement* dan pemilu

Berdasarkan Gambar 7, menunjukan bahwa tema *Disenfranchisement and Election* dalam penelitian Scopus tahun 2020–2025 memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai konsep multidisipliner. Gambar Wordcloud menunjukkan bahwa istilah “*election*” menjadi pusat dari berbagai narasi, dikelilingi oleh istilah seperti “*voting behavior*”, “*politics*”, dan “*criminal justice*”, yang menandakan bahwa pemilu dipahami tidak hanya sebagai proses politik, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan hukum. Klaster warna yang berbeda dalam visualisasi tersebut mengindikasikan adanya pengelompokan tematik, seperti isu hukum pidana yang diwakili oleh “*felony disenfranchisement*” dan “*criminal justice*”, serta isu hak sipil yang diwakili oleh “*voting rights*” dan “*citizenship*”. Ini menunjukkan bahwa penelitian dalam tema ini mencakup spektrum yang luas, dari aspek struktural

hingga individual.

Sementara itu, analisis frekuensi dari tahun ke tahun memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan peningkatan konsisten dalam penggunaan istilah-istilah utama seperti “*election*”, “*disenfranchisement*”, dan “*voting rights*”. Tren ini mengindikasikan bahwa isu penghilangan hak suara semakin menjadi perhatian utama dalam studi akademik, terutama dalam konteks sistem hukum dan partisipasi politik. Istilah “*felony disenfranchisement*” yang muncul sejak awal dan terus bertahan hingga 2025 menunjukkan bahwa hubungan antara pelanggaran hukum dan hak suara menjadi topik yang terus relevan. Data ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai pemilu dan disenfranchisement berkembang secara simultan dalam kedalaman isu dan intensitas perhatian, mencerminkan kompleksitas dan urgensi isu tersebut dalam konteks demokrasi modern.



Gambar 8. *Density visualization on disenfranchisement and election theme research.*

Berdasarkan analisis visual dari gambar *Density Plot* pada tema *Disenfranchisement* and *Election*, terlihat bahwa istilah “*election*” menjadi pusat perhatian dalam penelitian, ditunjukkan oleh ukuran font yang paling besar dan posisi sentral dalam visualisasi. Warna latar yang bergradasi dari merah ke putih menunjukkan tingkat kepadatan atau intensitas topik dalam literatur akademik. Istilah seperti “*politics*”, “*criminal justice*”, dan “*united states*” berada di sekitar pusat, menandakan bahwa isu pemilu sangat erat kaitannya dengan konteks politik dan sistem hukum, khususnya di Amerika Serikat. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penelitian dalam tema ini berfokus pada dinamika pemilu dalam sistem demokrasi liberal dan bagaimana struktur hukum memengaruhi partisipasi politik.

Di sisi lain, istilah seperti “*felony disenfranchisement*”, “*voting rights*”, dan “*disenfranchisement*” muncul di area yang lebih rendah namun tetap dalam zona padat, menunjukkan bahwa isu penghilangan hak suara juga memiliki bobot penting dalam diskursus akademik. Penempatan “*electoral geography*” dan “*voting behavior*” di bagian atas kanan menunjukkan bahwa aspek spasial dan perilaku pemilih juga menjadi bagian dari analisis yang lebih luas. Visualisasi ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa penelitian mengenai pemilu tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup berbagai dimensi seperti hukum, geografi, perilaku, dan hak sipil, yang saling berinteraksi dalam membentuk pemahaman komprehensif tentang disenfranchisement dalam konteks demokrasi.

## KESIMPULAN

Tema *Disenfranchisement and Election* dalam indeks Scopus periode 2020–2025 menunjukkan bahwa kajian ini mengalami perkembangan yang kompleks, baik dari segi intensitas maupun kedalaman isu. Penelitian tidak lagi terbatas pada aspek elektoral semata, melainkan telah berkembang menjadi kajian multidisipliner yang mencakup dimensi hukum pidana, hak-hak sipil, perilaku pemilih, dan identitas kewarganegaraan. Melalui pendekatan analitis yang mencakup identifikasi penulis paling relevan dan berpengaruh, pemetaan kontribusi negara, serta analisis struktur konseptual melalui visualisasi jaringan dan kepadatan topik, ditemukan bahwa Amerika Serikat menjadi pusat produksi ilmiah dalam tema ini, sementara negara-negara Global South mulai menunjukkan keterlibatan yang menjanjikan. Visualisasi seperti *wordcloud*, frekuensi kata dari waktu ke waktu, dan *density plot* memperkuat temuan bahwa isu penghilangan hak suara semakin menjadi perhatian utama dalam literatur akademik, terutama dalam konteks keadilan sosial dan inklusi politik. Tren ini mencerminkan pergeseran

paradigma dalam studi pemilu, dari pendekatan prosedural menuju pendekatan yang lebih kritis dan reflektif terhadap ketimpangan struktural dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, hasil analisis ini tidak hanya memberikan gambaran tentang lanskap penelitian yang sedang berkembang, tetapi juga membuka peluang strategis untuk membangun kolaborasi lintas negara dan disiplin dalam rangka memperkuat literatur dan advokasi terhadap pemilu yang lebih adil dan inklusif secara global.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih atas pendanaan untuk penelitian dosen pemula dari Universitas Jambi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), atas komitmen dan dukungan yang memungkinkan penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah di lapangan.

## REFERENSI

- Abrams, S., Anderson, C., Kruse, K. M., Richardson, H. C., & ... (2020). *Voter suppression in US elections*. books.google.com. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=NX\\_rDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=disenfranchisement+in+election&ots=huRnnSOM9o&sig=sfEPvYUBvunljICBWyP2YqCmOtA](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=NX_rDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=disenfranchisement+in+election&ots=huRnnSOM9o&sig=sfEPvYUBvunljICBWyP2YqCmOtA)
- Agus Sutisna, & Ita Nurhayati. (2021). Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematik Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 70–96. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.296>
- Amaker, J., Lyn, D. M., & Robertson, M. (2022). Mass Incarceration & The Minority Vote: The Case for a Federal Ban on Felon Disenfranchisement. *Notre Dame JL Ethics & Pub. Pol'y*. [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/ndlep36&section=23](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/ndlep36&section=23)
- Baker, M. (2021). Texas Disenfranchisement of Felons. *Quest*. <https://digitalcommons.collin.edu/quest/vol5/iss1/6/>
- Bateman, D. A. (2025). Democratization in the USA? The impact of antebellum suffrage qualifications on politics and policy. *The Journal of Politics*. <https://doi.org/10.1086/730750>
- Dawood, Y. (2022). Constructing the demos: voter qualification laws in comparative perspective. *Comparative Election Law*. <https://www.elgaronline.com/abstract/edcoll/9781788119016/9781788119016.00025.xml>
- Dolan, T. (2023). Congress' Power to Affirm Indian Citizenship Through Legislation Protecting Native American Voting Rights. *Idaho L. Rev.* [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/idlr59&section=6](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/idlr59&section=6)
- Esfandiari, F., & Fatih, S. Al. (2020). Initiating a Permanent Electoral Body To Resolve Dignified Election Disputes: Assessing the Effectiveness of Gakkumdu. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(3), 333. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3.44437>
- Fatai, A. (2020). Smart card readers and the quality of the 2019 general elections in Nigeria: successes and challenges. *The Round Table*. <https://doi.org/10.1080/00358533.2020.1788755>
- Ferrer, J., Geyn, I., & Thompson, D. M. (2024). How partisan is local election administration? *American Political Science Review*. <https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/how-partisan-is-local-election-administration/956E3FE5025E561198043C2E9B5E09C0>
- Guderjan, M., & Wilding, A. (2020). Brexit populism: Disenfranchisement and agency. *Contested Britain*. <https://bristoluniversitypressdigital.com/edcollchap/book/9781529205015/ch007.xml>
- Hassan, W., & Duarte, A. E. (2024). Bibliometric analysis: a few suggestions. *Current Problems in Cardiology*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0146280624002792>
- Herman, J. L., Cisneros, N., Mahowald, L., & Tentindo, W. (2024). *The Potential Impact of Voter Identification Laws on Transgender Voters in the 2024 General Election*. [escholarship.org. https://escholarship.org/content/qt62p457xz/qt62p457xz.pdf](https://escholarship.org/content/qt62p457xz/qt62p457xz.pdf)
- Ilma andasari, R., Abrar, S. ainun soraya, Santi, S., & Veronica, M. (2022). The Non-Voting Behaviour in City of Makassar Regional Election 2020. *Politics and Humanism*, 1(2), 75–83. <https://doi.org/10.31947/jph.v1i2.23749>
- Imaduddin, M., & Eilks, I. (2024). A scoping review and bibliometric analysis of educational research on

- water literacy and water education. In *Sustainable Chemistry and Pharmacy*. Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235255412400408X>
- Jumaeli, E. (2021). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(1), 1–12.
- Kaffash, S., Nguyen, A. T., & Zhu, J. (2021). Big data algorithms and applications in intelligent transportation system: A review and bibliometric analysis. *International Journal of Production Economics*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527320302279>
- Lazarides, M. K., Lazaridou, I. Z., & ... (2023). Bibliometric analysis: bridging informatics with science. ... *International Journal of ...* <https://doi.org/10.1177/15347346231153538>
- Lidauer, M. (2022). Boundary Making in Myanmar's Electoral Process: Where elections do not take place. *Modern Asian Studies*. <https://www.cambridge.org/core/journals/modern-asian-studies/article/boundary-making-in-myanmars-electoral-process-where-elections-do-not-take-place/FA19847B8D4B45C2727583E3E0CC011E>
- Menzemer, L. W., Ronchi, E., Karsten, M. M. V, Gwynne, S., & ... (2023a). A scoping review and bibliometric analysis of methods for fire evacuation training in buildings. In *Fire safety journal*. Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379711223000103>
- Menzemer, L. W., Ronchi, E., Karsten, M. M. V, Gwynne, S., & ... (2023b). A scoping review and bibliometric analysis of methods for fire evacuation training in buildings. In *Fire safety journal*. Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379711223000103>
- Morey, B. N., Tanjasiri, S. P., Subica, A. M., & ... (2020). ... racism and its effects on Native Hawaiians and Pacific Islanders in the United States: issues of health equity, census undercounting, and voter disenfranchisement. *AAPI Nexus: Policy ...* <https://escholarship.org/uc/item/1gs2t6mk>
- Park, S., Sarkar, A., & Vats, N. (2021). Political voice and (mortgage) market participation: Evidence from minority disenfranchisement. In *Available at SSRN*. [aeaweb.org. https://www.aeaweb.org/conference/2023/program/paper/9eiyF63n](https://www.aeaweb.org/conference/2023/program/paper/9eiyF63n)
- Platon, S. (2020). The right to participate in the European elections and the vertical division of competences in the European Union. *European Citizenship under Stress*. <https://brill.com/downloadpdf/display/book/edcoll/9789004433076/BP000017.pdf>
- Raines, J. Z. (2022). Barred for Life: How State Felony Disenfranchisement Laws Ban Elderly Ex-Cons from the Voting Booth. *Elder LJ*. [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/elder30&section=9](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/elder30&section=9)
- Rumbia, D., Nirahua, S. E. M., & Piris, H. J. (2024). Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 142. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i2.2130>
- Yeargain, T. Q. (2022). Democratizing Gubernatorial Selection. *Ne. UL Rev*. [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/norester14&section=6](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/norester14&section=6)
- Zarkasi, A., Putra, F., Putra, D. syufradian, & Abdullah Asuhaimi, F. binti. (2025). Indonesia's 2024 Election: Constitutional Court Perspectives on Electoral Violations. *Sriwijaya Law Review*, 9(2), 372–398. <https://doi.org/10.28946/slrev.v9i2.4584>